



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : UKON AHMAD FURKON
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 899491

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.730.500.000

1. Tanah Seluas 78 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 201.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/116 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.295.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/40 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
4. Tanah Seluas 570 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000
5. Tanah Seluas 849 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000
6. Tanah Seluas 342 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 290.000.000

1. MOBIL, MAZDA MAZDA 2 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, KIA SONET Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 758.506.400

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 249.198.440

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	3.028.204.840
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.028.204.840

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.